

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat), maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa :

1. Sistem Pengendalian Intern yang dijalankan oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Data yang telah diolah menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern termasuk pada kategori sangat baik. Ini membuktikan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat telah menerapkan unsur – unsur yang terkandung dalam Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat telah disajikan atau dihasilkan dengan baik dan pada umumnya dapat dikatakan memenuhi keandalan laporan keuangan. Terbukti dengan hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, yang memberikan kesimpulan bahwa keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat masuk dalam kategori baik. Hal ini menjadi gambaran bahwa penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh yang dilandasi oleh hubungan yang kuat terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan menyebabkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, maka untuk dapat meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan keandalan laporan keuangan, ada beberapa saran yang penulis ajukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia di inspektorat, yang merupakan responden dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Sistem Pengendalian Intern agar pelaksanaannya dapat terwujud sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang rutin demi terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang optimal di masing – masing pemerintah daerah.

2. Berbagai temuan BPK (auditor eksternal pemerintah) mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern, hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga opini yang diberikan BPK semakin baik dan semakin banyak laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Berdasarkan penelitian ini, indikator dalam Sistem Pengendalian Intern yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk selanjutnya diperbaiki adalah mengenai pemisahan fungsi. Hendaknya dilakukan pemisahan fungsi yang sebaik – baiknya agar tercipta kegiatan pengendalian intern yang kondusif sehingga mendukung terhadap Sistem Pengendalian Intern yang optimal.
4. Laporan keuangan yang disajikan harus mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sehingga dapat memenuhi seluruh unsur dari keandalan laporan keuangan, diantaranya dapat diverifikasi. Sehingga ketika dilakukan pengujian oleh pihak yang berbeda tidak menunjukkan simpulan yang jauh berbeda.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis, ada baiknya menambah variabel penelitian yang relevan dengan obyek penelitian ini, misalnya ditambah dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Serta menambah variabel penelitian dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, karena dengan adanya sistem akuntansi dan sumber daya manusia yang memadai, akan menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu bisa juga ditambahkan mengenai pengawasan internal dan kualitas aparatur pemerintah daerah nya, sebagai suatu usaha untuk menjamin adanya kesesuaian penyelenggaraan tugas pemerintah. Sistem Pengendalian Intern juga bisa mempengaruhi terhadap kinerja dari pemerintah daerah dan penerapan prinsip – prinsip *good governance*. Sistem Pengendalian Intern juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dengan baik dan memadai akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya bisa juga menambahkannya sebagai variabel dependen.